

PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) UNTUK MENINGKATKAN POTENSI PENDAPATAN DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG

*Kriswanto*¹

¹ Kriswanto, STIH Paman, Banten
E-mail: kriswanto.kayat@gmail.com

A B S T R A K

Selama 70 tahun sudah Negara Indonesia membangun dalam berbagai bidang namun tanpa disadari telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan antar wilayah yang semakin besar. Investasi dan sumber daya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah Hiterland mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan. Sebagai ilustrasi ketimpangan yang terjadi antar desa-kota, wilayah Indonesia timur dan barat, dan wilayah Jawa dan luar Jawa.

Saat ini di tengah menguatnya focus pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan daerah, melalui berbagai langkah telah dan akan terus di programkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat pembangunan daerah diantaranya melalui pendekatan anggaran. Di sisi lain peran anggaran yang didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tentu dikelola oleh pemerintah daerah di samping keberadaan anggaran daerah yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Melalui pendekatan struktur pemerintahan daerah, unit terkecil dari pemerintahan daerah ialah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa, dalam kerangka tujuan pembangunan daerah dipandang sebagai objek yang akan dibangun. Pembangunan desa akan berimplikasi terhadap kemajuan daerah sehingga konsentrasi pembangunan desa dalam berbagai pendekatan menjadi penting untuk ditingkatkan.

Dalam struktur pemerintah desa, guna mempercepat pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat maka dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang fokus terhadap upaya meningkatkan keterampilan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah daerah yang menaungi lembaga kemasyarakatan desa, dalam Pasal 94 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan "Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa".

Kata Kunci: *Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pendapatan Desa Di Kabupaten Pandeglang*

A. PENDAHULUAN

Selama 70 tahun sudah Negara Indonesia membangun dalam berbagai bidang namun tanpa disadari telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan antar wilayah yang semakin besar. Investasi dan sumber daya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah Hiterland mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan. Sebagai

ilustrasi ketimpangan yang terjadi antar desa-kota, wilayah Indonesia timur dan barat, dan wilayah Jawa dan luar Jawa.

Memang pembangunan dibidang ekonomi yang selama ini dilakukan semakin membaik, yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran namun pembangunan tersebut perlahan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kesenjangan (Gini Ratio) yang terjadi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan komite ekonomi nasional (KEN) diperoleh angka bahwa tingkat Gini Ratio tahun 2011 sebesar 0,41, artinya 1 persen penduduk yang ada di Indonesia. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari tidak maksimalnya efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan sulitnya menjangkau penduduk miskin karena keadaan geografis.

Saat ini di tengah menguatnya focus pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan daerah, melalui berbagai langkah telah dan akan terus di programkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat pembangunan daerah diantaranya melalui pendekatan anggaran. Di sisi lain peran anggaran yang didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tentu dikelola oleh pemerintah daerah di samping keberadaan anggaran daerah yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Umumnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
2. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan pendidikan;
3. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan kesehatan;
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
5. Terbatasnya aksesibilitas layanan perumahan dan sanitasi;
6. Terbatasnya aksesibilitas layanan air bersih;
7. Besarnya beban tanggungan keluarga; dan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
8. Lemahnya jaminan rasa aman;
9. Terbatasnya sarana dan prasarana wilayah;
10. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;
11. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya aksesibilitas sumber daya alam;
12. Lemahnya partisipasi.

Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah dan desentralisasi sudah menjadi mungkin sekali untuk mengejar ketertinggalan daerah pada berbagai bidang.

Pendekatan anggaran, kegiatan serta pemberdayaan aparatur daerah menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkorelasi terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Melalui pendekatan struktur pemerintahan daerah, unit terkecil dari pemerintahan daerah ialah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa, dalam kerangka tujuan pembangunan daerah dipandang sebagai objek yang akan dibangun. Pembangunan desa akan berimplikasi terhadap kemajuan daerah sehingga konsentrasi pembangunan desa dalam berbagai pendekatan menjadi penting untuk ditingkatkan.

Dalam struktur pemerintah desa, guna mempercepat pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat maka dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang fokus terhadap upaya meningkatkan keterampilan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah daerah yang menaungi lembaga kemasyarakatan desa, dalam Pasal 94 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan “Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”.

Masyarakat desa dipandang perlu untuk diberdayakan dan dikembangkan dalam kerangka partisipasi pembangunan desa yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi aktif tersebut dapat melalui berbagai kegiatan yang menyentuh aspek pembangunan social dan ekonomi masyarakat di desa.

Dari uraian latar belakang masalah ini maka akan dilihat dilakukan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Untuk meningkatkan Potensi Pendapatan Desa Di Kabupaten Pandeglang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang diperoleh akan dipresentasikan melalui kata-kata. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data kepustakaan yang meliputi bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangann yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti;
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Berbagai buku mengenai perundang-undangan dan asas-asas hukum serta data-data tertulis lain yang terkait dengan penelitian;

-
- 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian;
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui data primer dan data sekunder.
 1. Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang sedang diteliti atau melihat apa saja yang terjadi terhadap objek yang sedang diteliti;
 - b. Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan-informan.
 2. Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif, melalui teknik deskriptif akan dikumpulkan berbagai data dan informasi yang diperoleh selama penelitian lalu kemudian akan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan

C. PEMBAHASAN

1. Pembangunan Desa

Pembangunan desa dan kawasan pedesaan merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Perkembangan desa di Indonesia meningkat pesat dengan rata-rata pertumbuhan 2,29 persen atau 1.409 desa pertahun. Tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dari masyarakatnya. Berdasarkan data Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri, pada tahun 2014 terdapat 514 kabupaten/kota dengan jumlah desa sebanyak 74.045 desa. Berdasarkan analisis KDPDTT dari jumlah tersebut terdapat 52,79 persen desa tertinggal dan 23,32 persen desa sangat tertinggal.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah melakukan pembangunan melalui dua arah (ganda) yaitu: *Pertama*, dengan perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang disebut

“desa membangun”, *Kedua*, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan pedesaan yang disebut “membangun desa”. Kedua pola pembangunan tersebut mempunyai tujuan yang sama namun poladan cara yang dilakukan mempunyai perbedaan antar keduanya. Undang-Undang Desa membedakan dengan tegas antara konsep pembangunan perdesaan (membangun desa) dan pembangunan desa (desa membangun).

Dalam pembangunan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang tidak menyeluruh dan tidak di kontomsini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan pedesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan, perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan.

Selama ini masyarakat pedesakan dicirikan dengan kondisinya yang serba kurang jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Dari segi ekonomi jelas terbukti bahwa masyarakat kota lebih mempunyai taraf kehidupan jauh di atas masyarakat pedesaan. Dari segi pendidikan, jumlah serta kualitas pendidikan masyarakat desa jauh di bawah masyarakat perkotaan.

Dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pembangunan wilayah pedesaan saat ini, secara umum kita di hadapkan pada banyak tantangan yang sangat berbeda sifatnya dibandingkan pada masa – masa yang lalu. Tantangan pertama berkaitan dengan kondisi eksternal seperti perkembangan internasional yang berhubungan dengan liberasi arus investasi dan perdagangan gobl, sedangkan yang kedua bersifat internal, yaitu yang berkaitan dengan perubahan kondisi makro maupun mikro dalam negeri, masalah migrasi dan sektoral, ketahanan pangan masalah ketersediaan lahan pertanian, masalah investasi dan permodalan, masalah iptek, SDM, lingkungan dan masih banyak lagi,

2. Potensi Desa

Potensi dalam penelitian ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua ;pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah,air, iklim,lingkungan geografis, binatang ternak dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya lembaga-lembaga social, lembaga pendidikan dan organisasi social desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Potensi Fisik

Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada didesa berupa :

- a. Lahan, lahan tidak hanyasebagai tempattumbuh tanaman, tetapijuga sebagaisumber bahan tambang dan mineral. Lahan memilikijenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. misalnya jenis tanahaluvial cocokbagi tanaman padi, jagung dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu.Pada lahan juga di mungkinkan terjadi eksploitasi bahan tambang seperti batu bara, batu kapur,pasir kuarsa batu marmer dan sebagainya
- b. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat , missalnya kesuburan tanah, bahan tambang dan bahan mineral.
- c. Air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air, berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidupuntuk bertahan hidup dan juga untuk aktifitas sehari-hari.
- d. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperature dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimna bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu, Seperti perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan, sehingga corakiklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa.
- f. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan gizi bagi masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternakjuga dapat menjadi infestasi dan sumber pupuk.
- g. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengelolaan lahan petani, sehingga manusia merupakan potensi yang sangat berharga bagi

suatu wilayah untuk mengelol sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

2. Potensi Non Fisik

Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata prilaku. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa aparat desa adat idtiadat dan budaya. Potensi fisik lainnya adalah lembaga desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain :

- a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (gameinschaft) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan.
- b. Lembaga dan Organisasi Social, lembaga atau organisasi social merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam kehidupan sehari – hari, seperti:
 - 1) Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain – lain.
 - 2) Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok pencapir, penyuluhan, simulasi, dan lain- lain.
 - 3) Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandi, dan BKIA
 - 4) Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes, Pasar Desa, dan lumbung desa.
- c. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintah desa. Perannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Contohnya : Kepala desa, Kepala dusun, Kepala adat, dan lain – lain Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintah desa. Perannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Contohnya : Kepala desa, Kepala dusun, Kepala adat, dan lain

Potensi fisik dan non fisik desa tersebut merupakan factor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan – bahan pokok

bagi masyarakat kota. Sedangkan berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga :

1. Wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat di daerah berpotensi subur, topografi rata, dan

Dilengkapi dengan irigasi teknis

2. Wilayah desa berpotensi sedang, terdapat di daerah dengan lahan pertanian agak subur,

Topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semi teknis

3. Wilayah desa berpotensi rendah, terdapat di daerah pertanian tidak subur topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.

Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui pengembangan potensi unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat, sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah :

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan
6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

STRATEGI PEMBANGUNAN POTENSI DESA

Ada beberapa hal yang bias dilakukan sebagai landasan dalam mengembangkan potensi pedesaan sebagai salah satu instrument yang akan menjadi indikator pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan sebagai berikut :

1. Sebuah modul kota dasar (*basic urban module*) yang terdiri dari distrik-distrik otonom, yang dibangun pada kawasan desa berkepadatan tinggi atau

kawasan peri urban, dengan populasi sebesar 10.000-15.000 jiwa yang tersebar di area seluas 10-15 km².

2. Setiap wilayah memiliki pusat pelayanan yang dapat diakses dengan mudah dari segala penjuru di wilayah tersebut, baik dengan kaki maupun sepeda, selama 20 menit atau kurang.
3. Setiap pusat pelayanan memiliki komplemen pelayanan dan fasilitas public terstandarisasi.
4. Dipilih satu wilayah pusat (area desakota yang telah mengalami transformasi spesial paling besar) untuk dibangun sebagai pusat pengelolaan potensi pedesaan terkait.
5. Lokasi dan system transportasi di wilayah terkait dan pusat pelayanan harus memungkinkan para petani untuk menglaju (commuting)
6. Wilayah dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas yang menghasilkan satu komoditas atau badan mentah utama dan beberapa komoditas penunjang sesuai kebutuhan. Selanjutnya wilayah didorong untuk membentuksatuan usaha yang optimal dan selanjutnya diorganisasikan dalam wadah koperasi, perusahaan kecil dan menengah.

Ada beberapalangkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desabisaberjalan dengan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan obyek obyek yang bisadikembangkan
2. Melakukan survai lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan di jadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitas-fasilitas yang akan di implementasikan.
3. Melakukan pengkajian melalui tubulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan
4. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan.
5. Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan” berdasarkan kondisi riil di lapangan.
6. Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah dihasilkan.

Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulaidari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan, Dengan mengembangkan partisipasimasyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasilpembangunan desa. Untuk mendukung pelaksanaan potensi desa diatas dapat dilakukan melalui beberapa cara di antaranya:

1. Sosialisasi pengembangan potensi melalui musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Musyawarah desa, Pimpinan Rukun Warga (RW), Pimpinan Rukun Tetangga (RT), lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat. Dalam sosialisasi ini perlu di sampaikan maksud pengembangan potensi desa, langkah-langkah yang perlu di tempuh, dan tugas serta peran masingmasing.
2. Pendataan potensi desa dan kebutuhan masyarakat oleh masing-masing RT, selanjutnya dihimpun dalam rapat RW untuk dikirim ke pemerintah desa.
3. Pemerintah desa menghimpun dan mendata potensi desa dan kebutuhan masyarakat dari setiap RT/RW serta masukan dari lembaga;
4. Musyawarah desa untuk merumuskan potensi desa yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. Dalam musyawarah ini juga dibentuk Tim tim pengembang sesuai kebutuhan dan keahliannya.
5. Masing-masing tim pengembang melakukan survey lapangan serta pengkajian untuk merumuskan skala prioritas pengembangan agar benarbenar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Hasil survey dan pengkajian disampaikan dalam musyawarah desa, untuk disepakati sebagai program pembangunan desa dan dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Tahunan. Implementasi pengembangan potensi desa dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dalam musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.

Dalam upaya membangun desa maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan link and match. Karena

link and machth merupakan kunci utama tercapainya pembangunan yang baik. Artinya keterkaitan/sinergisitas kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat (*top down planing*) dan pemerintah desa (*bottom up Planing*) sangat diperlukan. Dalam hal ini kebijakan pembangunan di pedesaan juga harus tidak bertolak belakang dengan strategi pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Adapun dasar strategi pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah
2. Memanfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
3. Membangun dari pinggiran dan dari desa
4. Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat
5. Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas

Dalam upaya mencapai sinergi pembangunan yang diinginkan maka ada beberapa aturan dan ketentuan yang harus terpenuhi dan dipenuhi. Sesuai dengan tujuan pembangunan pada pemerintahan daerah saat ini maka ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi menyangkut norma, dimensi pembangunan, dan kondisi sosial, ekonomi yang terjadi.

Dengan berdasarkan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maka hal yang perlu dilakukan dalam mencapai sinergisitas pembangunan adalah dengan pembangunan dari daerah/desa dari bawah (*Button up Planing*) atau yang dikenal dengan membangun dari pinggiran. Tujuan utama dalam pembangunan ini adalah memperkuat daerah atau desa untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan.

Selain sinergisitas kebijakan pembangunan dari pusat dan daerah pinggiran juga harus berbasis pada strategi pembangunan nasional yaitu penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:

1. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan umum untuk pelayanan dasar di pedesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
2. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, dunia usaha dan masyarakat.
3. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat.
4. Memanfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat

5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keamanan, administrasi, kependudukan, pertanahan akta-akta daministrasi dan sebagainya
6. Peningkatan konektifitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan dipedesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
7. Peningkatan dan penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah. Untuk merealisasikan dan mempercepat pembangunan pedesaan maka dapat dilakukan dengan dua pendekatan diantaranya:

1. Evaluasi Struktural.

Sasaran utama evaluasi struktural adalah tertatanya struktur dan system hubungan antara semua komponen dan system kehidupan, baik diwilayah desa dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selain itu penataan struktur dan system hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama

ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit.

Evaluasi struktural dilakukan dengan langkah-langkah strategi sebagai berikut:

- a. Pengembangan jaringan pendukung
- b. Pengembangan system pengawasan berbasis masyarakat Pengembangan kapasitas kelembagaan.
- c. Peningkatan aksbililas masyarakat terhadap informasi.
- d. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.
- e. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.
- f. Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada Sumber Daya Alam.

2. Evaluasi Subyektlf.

Evaluasi subyektif (non struktural) adalah menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat

menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat local dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumberdaya alam disekitarnya.

Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pedesaan dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumber daya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat: dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan. Pendekatan ini dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Penggalan dan pengembangan nilai tradisional masyarakat.
- b. Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperan serta.
- c. Pengembangan kualitas diri.
- d. Pengembangan kapasitas masyarakat.;
- e. Pengembangan keterampilan masyarakat.
- f. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan.

Dan untuk merealisasikan hal tersebut maka dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
- 2) Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan, pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah Pedesaan.
- 3) Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat petani dalam pelestarian lingkungan.
- 4) Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah Desa

C. PENUTUP

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1. Pengembangan potensi desa bertujuan untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan desa harus mempertimbangkan dan berdasarkan pada potensi masing-masing desa (potensi fisik dan potensi non fisik) dengan mengedepankan keunggulan masing-masing desa.
2. Dalam mengembangkan potensi desa agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu langkah-langkah, dasar, dan strategi kebijakan yang cerdas. Dalam upaya pengembangan potensi dan perlu memberdayakan partisipasi masyarakat agar mereka merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab..

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), Yogyakarta : Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- Corrado, Frank. M. 2004, *Berkomunikasi Dengan Karyawan*, Cetakan Pertama, PPM : Jakarta.
- Dye, Thomas R., 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Englewood Cliffs
- Eaton, Joseph W. 1986, *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional Dari Konsep Ke Aplikasi*, UI Press, Jakarta.
- Grigg, Neil, 1988. *Infrastrucmre Engineering and Management*. John Wiley and Sons.
- Hasibuan, Melayu. S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta : Rajawali Press
- Kodoatie, Robert, 2005. *Pengantar Manajemen Infrastrukmr*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Machendrawati, Nanih dan Agus Ahmad Syali'i. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam, Ideologi, Strategi Sampai T radisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Mulyono, Deddy. 2001. *Perencanaan dan Pengendalian Program pembangunan*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Nystorm and Sturbuck, ed. 1981. *Hand Book of Organization Design*. Oxford : University Press
- Pabundu, Moh. Tika. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Cetakan pertama. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Rahmat, Abdul. 2003. *Andragogi dan Pengembangan Masyarakat*, Jurnal PMI Vol 1 No. 1. September.
- Robbins dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Siagian, Sondang. P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara: Jakarta
- Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinetja*, Edisi Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Winamo, Budi. 2003, *Komparsi Organisasi Pedesaan Dalam Pembangunan*, Media Presindo.
- Jakarta Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat.